

Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat

Fadhillah Insani*, Isnaini Harahap, Rahmi Syahriza
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
*fadhillahinsani@gmail.com

Abstract

Empowerment is a process of being empowered, having the strength, ability and energy to master something. As a process, empowerment is the first step for people who are powerless to become empowered where people can have strength, ability and master something that can empower their lives, both personally, in their families and in society. Empowerment of coastal communities is expected to be more empowering and improve welfare. In order to improve the community's economy and improve the Human Resources (HR) of fishing communities, of course empowerment programs must exist and be implemented to reach the fishing communities. This research aims to analyze the economic empowerment of coastal communities in Perlis Village, West Brandan District, Langkat Regency with an Enabling, Empowering and Protecting approach. The research method used is qualitative. The results of this research are that Perlis Village, with the majority working as fishermen, has potential, namely processed products from the sea in the form of sea salt, shrimp paste (belacan), and salted fish. The proceeds from sales of these products can help society improve welfare. Furthermore, fishermen who used to work in the sea looking for fish now concentrate on cultivating mud crabs and overseeing ecotourism, although there is still mangrove tourism in the area. These potentials still need to continue to be developed with the empowerment program implemented by the Perlis Village government. Regional government has four roles in community empowerment. First, the role of government regulators is to set rules to balance development implementation. Second, the government functions as a dynamist by encouraging the participation of various parties when the development process stops (encouraging and maintaining the dynamics of regional development). Third, the government functions as a facilitator by creating conducive conditions for the implementation of development (bridging the interests of various parties in optimizing regional development). Fourth, the government functions as a catalyst by encouraging the participation of various parties when the development process is stagnant.

Keywords: *Differentiation; Coastal Communities; Fisherman; Well-being*

Abstrak

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk berdaya, memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga untuk menguasai sesuatu. Sebagai suatu proses, maka pemberdayaan merupakan langkah awal bagi masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya dimana masyarakat bisa memiliki kekuatan, kemampuan serta menguasai sesuatu yang mampu berdayakan kehidupan mereka, baik secara pribadi, keluarga maupun dalam masyarakat. Pemberdayaan pada masyarakat pesisir diharapkan mampu lebih memberdayakan dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat nelayan, maka tentunya program-program pemberdayaan harus ada dan dilaksanakan hingga menyentuh pada masyarakat nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Perlis, Kecamatan

Brandan Barat Kabupaten Langkat pendekatan yang Enabling, empowering, dan protecting. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Desa Perlis dengan mayoritas berprofesi sebagai Nelayan memiliki potensi yaitu produk hasil olahan dari laut berupa garam laut, terasi (belacan), dan ikan asin. Hasil penjualan produk-produk tersebut dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya, para nelayan yang dulunya bekerja di laut mencari ikan sekarang berkonsentrasi pada budidaya kepiting bakau dan mengawasi ekowisata, meskipun masih ada wisata bakau di daerah tersebut. Potensi-potensi tersebut masih perlu terus dikembangkan dengan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Perlis. Pemerintah daerah memiliki empat peran dalam pemberdayaan masyarakat. Pertama, peran regulator pemerintah adalah menetapkan aturan untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan. Kedua, pemerintah berfungsi sebagai dinamisator dengan mendorong partisipasi berbagai pihak saat proses pembangunan berhenti (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Ketiga, pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dengan menciptakan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan (menjambatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Keempat, pemerintah berfungsi sebagai katalisator dengan mendorong partisipasi berbagai pihak saat proses pembangunan stagnan.

Kata Kunci: Pembedayaan; Masyarakat Pesisir; Nelayan; Kesejahteraan

Pendahuluan

Masyarakat pesisir merupakan kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Pesisir merupakan sebagian permukaan bumi yang terletak antara pasang naik dan pasang surut. Pada waktu pasang naik, pesisir tertutup oleh air laut dan pada waktu pasang surut nampak berupa daratan. Pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir, dan terdapat di daerah pesisir laut atau bagian daratan yang tersekat dengan laut. Masyarakat pesisir merupakan kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir (Soeprodjo, Ruru, and Londa 2020).

Wilayah pesisir pantai menjadi salah satu wilayah potensial yang kaya akan sumber daya alam lautnya. Oleh sebab itu, banyak masyarakat pesisir pantai yang memanfaatkan potensi tersebut dengan bekerja sebagai nelayan maupun petani tambak (Setyo Putra & Rahaju, 2022). Salah satu Desa di Kabupaten Langkat yang termasuk wilayah pesisir adalah Desa Perlis. Berbanding terbalik dengan kondisi sumber daya alam yang melimpah, kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial, dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan diberbagai kawasan pada umumnya ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya sumber daya manusia (SDM) karena sebagian besar penduduknya hanya lulus sekolah dasar atau belum tamat sekolah dasar, dan lemahnya fungsi dari keberadaan Kelompok Usaha.

Desa Perlis Pangkalan Berandan Kabupaten Langkat Sumatera Utara merupakan salah satu desa nelayan yang berada pada sebuah pulau kecil yang terpisah dari daratan pulau Sumatera dengan luas 611 ha. Secara geografis, Desa Perlis terletak di pinggir Sungai Babalan yang berjarak tidak jauh dari muara sungai sehingga mayoritas penduduk desa tersebut bekerja sebagai nelayan dan budidaya ikan. Jumlah penduduk Desa Perlis adalah 5.270 orang dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1.518 KK. Desa Perlis

didominasi oleh etnis Melayu, selain itu juga terdiri dari etnis Aceh, Cina, Jawa, Banjar, Mandailing dan Minangkabau. Selain mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan, juga ada yang bekerja sebagai wiraswasta, guru, PNS, buruh dan petani. Dari segi pendidikan, masyarakat pesisir sebagian besar masih rendah. Serta kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Ada beberapa sumber daya alam pesisir yang dapat dikelola dan dikembangkan, antara lain sumber daya perikanan yang meliputi sumber daya perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Budidaya meliputi budidaya air payau, pesisir dan laut, yang diharapkan mampu memberikan tingkat kesejahteraan terhadap masyarakat (Saragih et al., 2019)



Gambar 1. Profesi Masyarakat Desa Perlis
(Sumber: Rahmadani & Putra 2024)

Dari hasil diagram diatas terlihat bahwa mayoritas masyarakat Desa Perlis yang berprofesi sebagai nelayan, selanjutnya sebesar 10% merupakan produsen UMKM dari laut, 10% adalah petani, dan 10% adalah pedagang, pegawai, dan pendayung sampan. Kondisi masyarakat Desa Perlis tidak terlepas dari kemiskinan. Dari observasi penulis diketahui bahwa nelayan di Desa Perlis Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat mempunyai kehidupan ekonomi yang sangat miskin, terbukti dengan angka pendapatannya yang rendah. Nelayan di Desa Perlis merupakan nelayan tradisional yang masih menggunakan alat tangkap tradisional sehingga hasil tangkapannya juga tidak sebanyak penggunaan alat tangkap modern.

Selain nelayan, masyarakat Desa Perlis juga bekerja sebagai tukang dayung sampan. Dimana sampan menjadi alat transportasi penyebrangan utama untuk menuju Desa Perlis. Biaya penyebrangan yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 4000 per orang untuk masyarakat umum, dan Rp. 3000 untuk siswa/i. Selain masalah pendapatan yang kecil, masalah air bersih juga menjadi yang utama di Desa ini (Arabi, 2022)

Sebagian besar masyarakat masih menjadikan sumur bor sebagai sumber utama air bersih. Sumur bor ini sudah ada sejak masa Belanda dan hingga kini, belum keseluruhan dari rumah masyarakat yang dapat dialiri air bersih, sebagian masyarakat yang memiliki kemampuan dapat membuat sumur bor sendiri di rumah masing-masing tentunya dengan biaya yang tidak sedikit. Sanitasi di Desa ini juga belum baik. Sebagian masyarakat masih membuang kotoran (tinja) langsung ke laut. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar. Kesehatan yang memburuk tentunya akan menyebabkan masalah produktivitas dan menghambat proses perekonomian di daerah tersebut (Tanjung & Sinaga, 2019)

Ketergantungan masyarakat pesisir pada kondisi lingkungan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya masalah yang dihadapi mereka. Misalnya, limbah industri dan tumpahan minyak dapat mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi

masyarakat pesisir. Pencemaran lingkungan juga dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental karena limbah atau kurangnya kebersihan lingkungan (Surjaningrum et al., 2020). Pengetahuan, sikap, dan nilai, peluang untuk bertindak pro lingkungan, insentif untuk bertindak pro lingkungan, dan umpan balik yang dirasakan adalah lima komponen yang mempengaruhi perilaku peduli lingkungan masyarakat pesisir (Putra 2019)

Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan nelayan atau masyarakat pinggiran pantai, diantaranya; Kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat top down dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kemudian kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan, terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Rendahnya Sumber Daya Manusia dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan yang mengakibatkan pada hasil tangkapan ikan sedikit tentunya berdampak pula pada pendapatan yang akan didapat. Selain itu diketahui bahwa masyarakat miskin pesisir perlu diberdayakan sedemikian rupa. Dari sisi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, mereka sangat tergantung dari pemanfaatan hasil melaut dan dikatakan masyarakat miskin bekerja dan mencari nafkah melalui penangkapan ikan dan pekerjaan lain di laut setempat. Sebagian besar hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang meliputi sandang, pangan, dan tempat tinggal. Untuk pemenuhan kebutuhan sekunder seperti kesehatan, pendidikan anak sekolah, dan aktualisasi diri belum menjadi prioritas untuk dipenuhi (Hendra et al., 2023)

Kondisi nelayan Indonesia yang seolah tidak bisa terlepas dari lingkaran setan kemiskinan, menjadikan pemerintah dianggap tidak memiliki kemauan politis untuk merubah kondisi ini. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar, amanat Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan kepada Pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil merupakan salah satu wujud kepedulian Pemerintah terhadap kehidupan nelayan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui program-program pemberdayaan kepada masyarakat pesisir. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan masyarakat merupakan suatu konsep yang berkesinambungan, karena masing-masing dari konsep tersebut bertujuan untuk menciptakan adanya perubahan sosial melalui prinsip kemandirian masyarakat agar bisa mensejahterakan dirinya sendiri dengan memanfaatkan potensi-potensi yang mereka miliki.

Kajian ini mendefinisikan pemberdayaan masyarakat (empowerment of the community) dan pembangunan masyarakat (community development) sebagai pemberdayaan masyarakat yang disengaja dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat lokal merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya yang mereka miliki sehingga mereka dapat mencapai kemampuan dan kemandirian yang berkelanjutan secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat (Noor 2018). Sudah banyak program pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Perlis. Beberapa diantaranya adalah Program Perlis Cinta Lingkungan, Hidroponik, Bank Sampah dan bantuan-bantuan lain seperti bantuan alat tangkap dari Dinas perikanan dan kelautan serta bantuan pohon (mangga) dari dinas pertanian. Namun, program-program ini tidak menunjukkan hasil yang signifikan untuk masyarakat setempat. Beberapa berpendapat bahwa program yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang merupakan nelayan. Namun, hal ini terjadi karena sumber daya manusia di Desa ini yang kurang berpartisipasi dalam menjalankan program pemberdayaan yang diberikan.

Kebanyakan masyarakat memilih bersikap berpangku tangan akan bantuan yang diberikan, menganggap bahwa akan ada terus bantuan dan tidak ingin mandiri. Bahkan beberapa pihak melakukan tindakan kriminal dengan mengganggu operasional program pemberdayaan. Kemampuan SDM yang rendah ini dipengaruhi juga oleh pendidikan mayoritas masyarakat yang juga rendah. Untuk mendorong pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan desa dan pemangku kepentingan lainnya dapat menggunakan tiga pendekatan: Enabling, empowering, dan protecting. Perolehan garis dasar yang menggambarkan masyarakat desa yang sebenarnya adalah titik awal dari proses eksplorasi ini. Pemerintahan desa dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengembangkan potensi masyarakat mereka melalui enabling. Untuk memungkinkan berbagai potensi yang ada di masyarakat untuk berkembang, mereka harus didorong. Agar keberadaan potensi ini tidak stagnan, diperlukan upaya pengembangan.

Dengan empowering, pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dapat meningkatkan potensi masyarakat. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan potensi ini agar menjadi lebih kokoh dan berfungsi sebagai jalan menuju pemberdayaan masyarakat. Selain itu, langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi potensi masyarakat harus dilakukan melalui berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah desa untuk melindungi potensi yang dimiliki masyarakat. Potensi yang sudah berjalan baik harus dilindungi agar tidak mudah kolaps. Kepala desa, sebagai pemimpin pemerintahan desa, memiliki kekuatan politik yang sangat penting untuk menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat tersebut. Jika tidak mendapat dukungan dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, political will akan menjadi kesia-siaan.

Penelitian yang dilakukan oleh La Suhu et al. (2020) tentang program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di wilayah pesisir Kota Tidore Kepulauan (Studi di Desamaitara Kecamatan Tidore Utara). Diketahui bahwa Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Maitara yaitu Sebagian masyarakat masih terkesan pasif dalam memahami pemberdayaan ekonomi, Manajemen pengelolaan ekonomi rata-rata masih standar, dan Pengelolaan dan pemasaran masih belum professional. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Antriandarti et al. (2023) tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pantai sadeng gunungkidul melalui pengolahan ikan tuna, menyimpulkan bahwa Pesisir Pantai Sadeng merupakan wilayah di Kabupaten Gunungkidul dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar, dimana diantaranya adalah potensi komoditas ikan tuna. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya tersebut masih belum optimal. Keterbatasan penggunaan teknologi membuat fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil terhambat sehingga berakibat pada menurunnya nilai ekonomis produk hasil tuna. Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini bertujuan mempercepat pengembangan masyarakat melalui pemberdayaan pelatihan pengolahan hasil ikan laut sehingga menjadi produk-produk yang bernilai jual lebih tinggi. Pemberdayaan yang dilakukan meliputi pemberian materi, peralatan, pelatihan pembuatan produk hasil olahan tuna yang bertujuan untuk kemandirian dan swadaya masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana masyarakat pesisir Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, diberdayakan melalui pendekatan yang Enabling, empowering, dan protecting. Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis untuk memberikan informasi kepada para pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Perlis dari sudut pandang akademis, dan manfaat secara praktis untuk memberikan gambaran tentang pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir Desa Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat.

Metode

Penelitian ini melakukan penelitian deskriptif kualitatif dengan melihat, meninjau, mengidentifikasi, dan menggambarkan situasi lapangan. Kemudian, berdasarkan temuan, kesimpulan dibuat. Metode pengumpulan data peneliti terdiri dari sumber primer (wawancara) dan sumber sekunder (dokumen, publikasi, landasan hukum, dan laporan). Data dikumpulkan dari informan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik penarikan *purposive sampling* digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli atau memiliki kewenangan yang tinggi. Fokus peneliti adalah untuk melihat kondisi yang ada di lapangan terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir di Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat yang akan dikaitkan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat *enabling*, *empowering*, *protecting* yang diantaranya yaitu : (1) *enabling*, dimana menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. (2) *empowering*, dimana memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. (3) *protecting*, dimana dalam proses pemberdayaan harus mencegah orang yang lemah menjadi bertambah lemah yang disebabkan kurang berdayanya dalam menghadapi yang kuat.

Hasil dan Pembahasan

1. *Enabling*

Nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pedagang ikan, dan pemasok produksi perikanan adalah contoh masyarakat wilayah pesisir, yang merupakan kelompok orang yang tinggal di wilayah pesisir dan sumber daya ekonominya bergantung pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir. Sama halnya dengan masyarakat Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat yang kedekatannya dengan pantai di Desa Perlis dan masyarakat pesisir lainnya di Kabupaten Langkat menjadikannya lokasi yang ideal untuk pengolahan ikan dan penangkapan ikan. Sebagian besar orang di Desa Perlis adalah nelayan, menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi masyarakat yang paling menonjol. Saat ini, nelayan Desa Perlis menangkap berbagai jenis ikan, termasuk kembung, bawal, kulit, ringing, cerek, rajungan, dan udang. Masyarakat Desa Perlis telah memanfaatkan semua kapasitas air desa untuk pertanian dan perikanan, serta sumber daya perikanan desa yang luas dengan banyak potensi yang belum digunakan.

Garam digunakan dalam memasak, manufaktur, dan aplikasi lainnya. Air laut memiliki rasa dan bau yang asin karena kandungan garamnya yang tinggi. Salah satu produk sampingan dari pengolahan air laut adalah garam. Banyak orang mendapatkan makanan dari air laut, terutama air yang digunakan untuk membuat garam. Penduduk lokal memanfaatkan kekayaan laut juga. Komunitas UMKM di Desa Perlis dapat menghasilkan 50 kg garam dari air laut. Produk hasil laut selanjutnya yang dapat dihasilkan oleh masyarakat Desa Perlis adalah Terasi atau Belacan. Di Desa Perlis, dua keluarga di Dusun 7 dan satu keluarga di Dusun 8 adalah usaha kecil dan menengah (UMKM) terasi. Satu keluarga dapat menghasilkan sekitar sepuluh hingga lima belas kilogram per hari.

Selain garam laut, terasi juga merupakan produk olahan hasil tangkap yang dihasilkan masyarakat Desa Perlis. Berkembangnya perajin terasi didorong oleh rumah terasi pertama di Dusun 1. Banyak masyarakat kemudian mulai membuat terasi di rumahnya. Sehingga Dusun tersebut disebut dengan Dusun Belacan. Di Dusun Belacan, tujuh keluarga tinggal karena sebagian besar rumah tangga memproduksi terasi atau Belacan. Mereka mengakui bahwa produsen Belacan saat ini tidak bergantung pada bisnis Belacan sebagai sumber pendapatan mereka, yang memperkuat hubungan mereka. Terasi

buatan warga Dusun 1 Desa Perlis ini mampu bertahan menghadapi pesaing-pesaingnya yang tidak kalah kuat di luar desa, seperti misalnya terasi dari Palau Kampai yang merupakan salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Langkat. Menurut Fakhruddin, salah seorang pembuat terasi Desa Perlis, bahwa terasi buatannya sudah dikirim sampai ke Medan, Batam dan Malaysia. Dengan pengalaman selama 22 tahun membuat terasi, Fakhruddin bangga menyatakan mantan gubernur Sumatera Utara tiap bulan memesan terasi dari dirinya (Nabilah & Zuska, 2022)

Sumber pendapatan masyarakat lainnya adalah ikan asin. Ikan yang tidak terjual dalam produksinya dijadikan oleh masyarakat Desa Perlis menjadi ikan asin. Untuk membuat kuliner ikan asin ini, ikan yang memiliki tingkat garam tinggi disimpan dan diproses, garam, bahan pengawet alami, ditambahkan ke dalamnya. Mengawetkan daging ikan memungkinkannya disimpan pada suhu kamar selama berbulan-bulan, meningkatkan umur simpannya, meskipun harus ditutup rapat. Nelayan dapat memanen antara 10 dan 20 kilogram ikan dari ikan yang tidak terjual; dengan panen yang besar, setiap keluarga dapat menghasilkan 7 hingga 15 kilogram ikan asin. Oleh karena itu, istri nelayan membagi ikan untuk membuat ikan asin dan mulai mengambil hasilnya. Hampir setiap pekarangan rumah adalah tempat menjemur ikan asin karena ikan yang ditangkap oleh masyarakat. Di Desa Perlis, ada yang mengatakan bahwa ikan asin, baik ikan biasa maupun ikan yang lebih mahal, seperti ikan segar tertentu, adalah makanan utama.

Masyarakat Desa Perlis juga merupakan petani tambak udang. Usaha tambak merupakan suatu kegiatan usaha ekonomis, dimana manusia mengusahakan, mengelola, dan mengendalikan sumberdaya hayati perikanan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih demi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya. Pembangunan usaha tambak diarahkan untuk memperbaiki usaha budidaya perikanan yang sederhana menjadi budidaya yang maju. Namun masalah yang terjadi di pada petani tambak udang pada desa perlis kecamatan pangkalan Brandan kabupaten Langkat yang telah di jumpai lemahnya akses terhadap modal dan pasar (terutama Petani tambak kecil), rendahnya kualitas sumber daya manusia, Serta sulit nya mendapatkan benur udang yang sehat dan ditambah keterlambatan datang benur udang yang di pesan saat ingin memulai masa budidaya, sehingga para petani tambak berhenti beberapa bulan dalam proses pembudidayaan udang. Hal ini yang mempengaruhi tingkat penghasilan mereka yang berdampak terhadap kesejahteraan petani tambak. Permasalahan lain yang sering dihadapi para nelayan di desa tersebut yaitu hasil tangkapan yang dijual dengan harga murah kepada tengkulak (Liniarti et al., 2023).

2. Empowering

Desa Perlis merupakan desa yang terletak di wilayah pesisir. Oleh karena itu program pemberdayaan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa ini adalah pemberdayaan di sektor perikanan. Untuk produk olahan pertama yaitu garam. Pemerintah Desa membantu dalam hal penggunaan media isolasi selama proses kristalisasi garam. Inilah yang membedakan garam Desa Perlis dengan daerah lain. Penggunaan media isolasi yang berbeda ini dapat membuat peningkatan kualitas dan jumlah produksi garam yang dihasilkan. Bidang yang terkait, seperti penggunaan teknologi membran sebagai media isolasi dalam produksi garam, menghasilkan produk akhir yang lebih padat dan transparan.

Selanjutnya adalah produk olahan yaitu terasi atau belacan. Dalam hal ini pemerintah Desa menyediakan fasilitas rumah produksi untuk digunakan anggotanya sebagai pusat kegiatan produksi. Para ibu rumah tangga di Desa Perlis mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi sejak Rumah Terasi diberdayakan. Para ibu rumah tangga yang menjadi anggota Rumah Terasi melihat peningkatan dalam kesehatan

keluarga, pendidikan, dan keadaan ekonomi mereka, serta peningkatan pendapatan mereka. Dengan mendaftar di Rumah Terasi, pemilik rumah dapat mempelajari semua teknik perdagangan dan memulai bisnis terasi yang sukses. Rumah Terasi dianggap sebagai tempat di mana para ibu rumah tangga berkumpul dan bekerja sama, dengan memanfaatkan kepercayaan, konvensi, dan jaringan distribusi terasi.

Dari hasil wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa produksi belacan di Desa Perlis ini membutuhkan hak paten untuk produk mereka ini. Hak paten, juga dikenal sebagai "hak eksklusif", diberikan kepada seseorang atau organisasi untuk mempertahankan hak eksklusif atas suatu produk atau jasa yang telah dibuat. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Pemerintah mengatur paten di Indonesia. Paten pemerintah melindungi hasil karya dan keahlian seseorang atau badan usaha. Tujuannya adalah untuk mencegah orang lain menggunakan atau memproduksi barang atau jasa tanpa persetujuan pemilik paten. Jika hak paten dilecehkan, pemilik paten dapat mendapatkan kompensasi dalam bentuk uang, ganti rugi, atau perintah untuk menghentikan pelanggaran. Hal ini masih menjadi harapan para anggota produksi kepada pihak pemerintah Desa.

Untuk pemberdayaan para petani tambak udang, sudah pernah diselenggarakan oleh para akademisi dalam hal ini Dosen dan Mahasiswa dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pelatihan kewirausahaan. Tim Pengabdian dapat menyimpulkan bahwa penggunaan e-commerce untuk memasarkan dan menjual hasil tangkapan maupun tambaknya dapat memperluas jangkauan penjualan dan promosi sehingga meningkatkan pendapatan nelayan. Hal ini dapat dilihat bahwa dengan adanya e-commerce di komunitas nelayan tingkat penjualan terhadap hasil laut dan tambak udang meningkat luas. Buyer bisa berasal dari luar desa Perlis yang dapat diartikan konsumen semakin bertambah sehingga pendapatan pun bertambah. Dan Nelayan juga tidak harus jual murah ke tengkulak yang berakibat meningkatnya harga jual. Untuk meningkatkan penjualan hasil tangkapan adalah para nelayan harus mampu memanfaatkan teknologi digital marketing. Sedangkan, solusi untuk meningkatkan pendapatan adalah para nelayan harus memiliki penghasilan tambahan lain yaitu dengan cara menciptakan penghasilan tambahan dilakukan dengan memberikan pelatihan budidaya udang berbasis teknologi. Pelatihan penggunaan alat kontrol tambak udang juga diberikan untuk meningkatkan hasil panen. Diharapkan dari kegiatan ini adalah para nelayan tidak lagi bergantung pada tengkulak karena telah memiliki produk dengan brand dan kemasan yang menarik serta dijual melalui e-commerce secara mandiri. Sedangkan cara untuk solusi pemanfaatan digital marketing dilakukan dengan memberikan pelatihan terkait pengemasan hasil tangkapan, pembuatan brand dan pemasaran melalui e-commerce (Sulchan et al., 2020)

Selanjutnya adalah, Pengaplikasian teknologi berupa alat kontrol suhu air tambak dan pemberian pakan secara otomatis dan dapat juga dimonitoring melalui internet dapat meningkatkan Hasil tambak udang dan Kesadaran akan pentingnya membuat laporan keuangan sederhana membuat kelompok nelayan terkhusus para ibu komunitas nelayan semakin paham akan pentingnya pembukuan keuangan sehingga dapat memotivasi ibu-ibu agar pandai mengelola keuangan dan menambah pendapatan (Liniarti et al., 2023)

Untuk mendorong pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha, pemerintah desa membantu masyarakat secara sinergis. Ini memungkinkan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk tumbuh dan berkembang menjadi bisnis yang tangguh dan mandiri. Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah adalah :(Adriyani et al., 2020)

- a. Menciptakan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

- c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan penegntasan kemiskinan.

3. *Protecting*

Kerusakan lingkungan dan sumber daya pesisir di Desa Perlis semakin parah. Jika metode yang digunakan saat ini terus digunakan, jumlah pohon bakau pasti akan berkurang karena penebangan dan penggundulan hutan yang terus-menerus. Semakin jelas bagi mereka betapa pentingnya kawasan mangrove untuk kelestarian lingkungan dan kesejahteraan nelayan. Akibatnya, para nelayan berusaha lebih keras untuk menjaga dan menjaga hutan-hutan ini (Purba et al., 2018) Industri ekowisata mangrove memungkinkan masyarakat nelayan dan keluarganya mendapatkan pekerjaan di Desa Perlis. Para nelayan yang dulunya bekerja di laut mencari ikan sekarang berkonsentrasi pada budidaya kepiting bakau dan mengawasi ekowisata, meskipun masih ada wisata bakau di daerah tersebut. Tidak banyak orang yang tahu atau tertarik untuk mengunjungi Desa Perlis karena banyak hal yang bisa diperbaiki. Penduduk setempat, bagaimanapun, masih berusaha menemukan cara baru untuk meningkatkan wisata bakau.

Hampir semua penelitian dan studi lapangan menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata dapat menghasilkan manfaat yang diinginkan, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, penerimaan devisa, kesempatan kerja dan peluang usaha, peningkatan pendapatan pemerintah dari pajak dan badan usaha milik pemerintah, dan sebagainya. Pariwisata memengaruhi berbagai aspek masyarakat, seperti politik, keamanan, dan sebagainya, tetapi juga memengaruhi masyarakat dan tempat wisata. Ini menunjukkan bahwa dengan semakin berkembangnya wisata pantai, masyarakat lebih mampu membuka usaha dan mengolah bisnis mereka agar tetap ramai untuk pengunjung (Iskandar, Abdul Malik Kasim, Hasanudin Akhiruddin Jalal Ihsan, 2022). Untuk memantau ekowisata mangrove, Masyarakat Desa Perlis mengambil langkah-langkah berikut: 1) rencana pembibitan mangrove; dan 2) struktur dan organisasi pengawas mangrove yang dipilih oleh pengelola lapangan. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ekowisata mangrove dengan mempromosikannya melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram, serta film dokumenter. Wisata mangrove dianggap sebagai sumber pendapatan utama karena Desa Perlis bergantung pada perikanan.

Tanaman mangrove memiliki banyak manfaat, terutama untuk kesehatan. Menurut pengetahuan turun-temurun dan uji coba yang telah dilakukan, masyarakat pesisir percaya bahwa tanaman mangrove, yang biasanya hanya digunakan sebagai pencegah abrasi, memiliki banyak manfaat untuk kesehatan mulai dari akar, kulit, daun, dan buah (Fajriani & Susilawati, 2023) Warga Desa Perlis menanam ribuan pohon bakau di sepanjang pantai sebagai bagian dari upaya mereka untuk memperbaiki pantai. Penanaman bibit bakau membantu mengisi kembali stok bibit pohon di daerah pesisir setelah pohon rusak, mati karena usia, atau ditebang untuk bahan bakau. Penanaman pohon bakau mengurangi erosi pantai dan melestarikan habitat spesies air seperti kepiting, bandeng, hering, dan burung laut. Penanaman kembali pantai juga dapat melestarikan lingkungan teluk dan pantai. Untuk melindungi planet kita dari kerusakan yang disebabkan oleh erosi laut, kita harus menanam pohon bakau di sepanjang garis pantai. Mangrove sangat penting untuk biota laut. Hutan bakau adalah rumah bagi berbagai jenis burung laut, termasuk kepiting dan ikan kecil. Pohon bakau tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi ikan, tetapi juga menjadi sumber makanan bagi mereka.

Dengan pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir Desa Perlis, pembangunan desa di daerah pesisir akan berdampak positif pada sosial budaya masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan dapat memperoleh pengetahuan tentang

kehidupan sosial, kebiasaan, dan tradisi para wisatawan dengan berinteraksi langsung dengan mereka. Mereka juga dapat secara tidak langsung mempelajari budaya yang dianut oleh para wisatawan, seperti sistem teknologi dan bagaimana teknologi digunakan dalam kehidupan modern. Di tempat lain, masyarakat nelayan di pesisir masih menjalankan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi (Prayogi et al., 2019).

Dalam kenyataannya, program pemberdayaan masyarakat memiliki kemampuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Karena sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, juga dianggap sebagai program yang berpangkal dan berbasis masyarakat. Dalam perspektif strukturasi, pemberdayaan nelayan adalah upaya untuk memungkinkan perubahan struktur dengan membebaskan nelayan dari ketergantungan pada pemerintah dan juragan. Dengan demikian, nelayan dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan keluar dari jaring kemiskinan yang mengekangannya. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa nelayan harus berhenti menggunakan relasi sosial yang mengikatnya sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan kelembagaannya. Artinya, untuk membangun komunitas nelayan miskin, program pemberdayaan juga harus digunakan untuk membangun kerekatan sosial (Amriwan, 2021).

Kesimpulan

Menurut hasil penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir di Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat telah memenuhi aspek enabling, empowering dan protecting. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat wilayah pesisir, khususnya masyarakat Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat terpenuhi. Pemerintah daerah memiliki empat peran dalam pemberdayaan masyarakat. Pertama, peran regulator pemerintah adalah menetapkan aturan untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan. Kedua, pemerintah berfungsi sebagai dinamisor dengan mendorong partisipasi berbagai pihak saat proses pembangunan berhenti (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Ketiga, pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dengan menciptakan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan (menjambatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Keempat, pemerintah berfungsi sebagai katalisator dengan mendorong partisipasi berbagai pihak saat proses pembangunan stagnan (Ketut, 2021)

Daftar Pustaka

- Adriyani, R., Erna, E., Siswanto, A., & Indrianto, R. (2020). Pendampingan Kelompok Usaha Kerupuk Rajungan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Pesisir Pantai Utara Cirebon. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 94.
- Amriwan, A. (2021). Dinamika Dan Hambatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Plabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 23(2), 244–263.
- Antriyandarti, E., Umi Barokah, Anandito, R. B. K., Wiwit Rahayu, Ramadani, A. R., & Madina, A. P. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai Sadeng Gunungkidul melalui Pengolahan Ikan Tuna. *Warta LPM*, 26(1), 75–84.
- Arabi, A. (2022). Situasi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Perlis Di Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan ...*, 2, 239–248.

- Fajriani, A., & Susilawati, S. (2023). Literature Review : Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Pesisir Melalui Tanaman Mangrove. *Kampurui Jurnal Kesehatan Masyarakat (The Journal of Public Health)*, 5(1), 56–66.
- Hendra, H., Nur, M., Haeril, H., Junaidin, J., & Wahyuli, S. (2023). Strategi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Pesisir. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(1), 72–80.
- Iskandar, Abdul Malik Kasim, Hasanudin Akhiruddin Jalal Ihsan, M. A. (2022). Ekowisata Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Masyarakat Pesisir Alor Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Phinisi Integration Review*, 5(3), 650–658.
- La Suhu, B., Rasid, P., & Kurniawan, M. (2020). Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Wilayah Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Government of Archipelago*, 1(1), 17–24.
- Liniarti, S., Nasution, R. S. A., & Sihombing, P. M. (2023). Peningkatan pendapatan kelompok nelayan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(2), 508–518.
- Nabilah, K., & Zuska, F. (2022). Lestarnya Usaha Terasi Udang: Studi Kasus Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. *Jurnal Mahasiswa Antropologi*, 1(1), 72–90.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 88.
- Prayogi, P. A., Luh, N., Julyanti, K., & Sari. (2019). *Kabupaten Badung*. 3(1), 17–28.
- Purba, R. B., Dwilita, H., & Nadra, U. (2018). *Buku Pengembangan BUMDes Berbasis Ekowisata Mangrove Di Kabupaten Langkat* (Issue March).
- Putra, D. F. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Peduli Lingkungan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Pesisir Desa Jenu Kabupaten Tuban). *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi*, 2(1), 117–126.
- Saragih, N. S., Sukiyono, K., & Cahyadinata, I. (2019). Budidaya Tambak Udang Rakyat Di Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan Risk Analysis of Production and Income the Shrimp Cultivation of the People in UrbanVillage Labuhan Deli , Sub District Medan Marelan, Medan City. *Agriseip*, 14, 39–52.
- Setyo Putra, T., & Rahaju, T. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir Di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. *Policy and Maritime Review*, 23–34.
- Sulchan, M., Maslihatin, M. Z., & Yulikah, A. (2020). *Peran Digitalisasi Bisnis Terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Meminimalisir Pengangguran di Indonesia*. 941–948.
- Surjaningrum, E. R., Ambarini, T. K., Ariana, A. D., Arbi, D. K. A., Cahyanti, I. Y., & Hartini, N. (2020). Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Masyarakat Pesisir Kota Surabaya. *INSAN Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 5(2), 134.
- Tanjung, S., & Sinaga, R. (2019). Masyarakat Sungai Babalan: Sejarah Sosial Desa Perlis, Pangkalan Brandan (1940-2004). *Jasmerah: Journal of Education and Historical Studies*, 1(2), 1.